Finalisasi Penyusunan Raperpres Penetapan Kawasan Stategis Nasional (KSN) Calon Ibukota Negara (IKN)

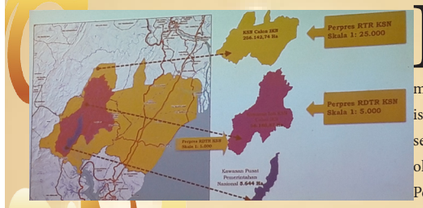

Rencana pemindahan ibukota negara merupakan salah satu isu dan agenda yang sedang serius digarap oleh pemerintah. Pemerintah selaku penggagas pemindahan ibukota negara sedang melakukan proses legislasi ke DPR-RI. Rancangan Undang-undang Ibukota Negara (RUU IKN) saat ini sedang dalam proses permintaan persetujuan dan diharapkan pada akhir Juni 2020 sudah ditetapkan menjadi Undang-undang IKN. UU IKN merupakan regulasi yang dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk memulai langkah konstitusional pemindahan ibukota negara, baik dalam penetapan anggaran APBN maupun pemindahan secara fisik.

Proses pengesahan RUU IKN masih membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan Kementerian/Lembaga (K/L) sektoral harus melakukan persiapan di sekitar Kawasan IKN maka Kementerian ATR/BPN melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Calon Ibukota Negara (IKN). Rapat pembahasan Raperpres penetapan KSN calon IKN sudah berlangsung sejak 2019 dan difinalisasi pada hari Kamis, 30 Januari 2020 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Rapat Finalisasi dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, (Dr. Abdul Kamarzuki) didampingi Deputi Bidang Hukum dan Perundangan Sekretariat Negara, (Lydia Silvanna Djaman, SH, LL.M). Raperpres Penetapan KSN Calon IKN setelah disahkan nantinya diharapkan dapat menjembatani (*bridging*) sebagai landasan hukum kegiatan fisik dan persiapan lahan yang dilakukan K/L.

Rapat finalisasi Raperpres penetapan KSN calon IKN bertujuan untuk memastikan kembali muatan Raperpres yang akan dilakukan pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM pada minggu pertama Februari 2020. Muatan Raperpres penetapan KSN calon IKN meliputi judul Raperpres (penetapan KSN Calon IKN), penetapan delineasi KSN Calon IKN, amanat penyusunan RTR KSN Calon IKN, tata kelola administrasi pertanahan (pembatasan pengalihan hak atas tanah dan pelepasan kawasan hutan) serta amanat penyesuaian RTRW provinsi dan kabupaten/kota di KSN Calon IKN ketika RTR KSN IKN sudah ditetapkan.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, (Dr. Uke Mohammad Husein) dalam rapat menyampaikan alasan judul Raperpres masih menggunakan kata calon dikarenakan untuk menghormati dan menghindari konflik dengan legislatif yang masih membahas penetapan lokasi IKN. Ketika DPR sudah menetapkan lokasi IKN maka perpres untuk RTR KSN tidak lagi menggunakan calon IKN tapi langsung disebut sebagai IKN. Delineasi KSN calon IKN berdasarkan kesepakatan mencakup luasan 256.142,74 hektar yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Delineasi KSN Calon IKN mencakup Kawasan Pusat Pemerintahan Nasional, Kawasan Inti dan Kawasan Pendukung KSN Calon IKN. Seluruh delineasi KSN Calon IKN akan disusun rencana tata ruangnya pada skala minimal 1:25.000 dengan pertimbangan sebagai kawasan perkotaan, sedangkan rencana detil tata ruang kawasan inti akan dipetakan pada kedalaman skala minimal 1:5.000. BIG sebagai instansi penyedia peta dasar sudah melakukan pemetaan skala 1:5.000 diseluruh wilayah KSN Calon IKN mencakup wilayah Handil, Sepaku, Sepan, Samboja dan Balikpapan namun masih dalam proses survei toponim dan kelengkapan lapangan. Penyiapan dokumen KLHS KSN Calon IKN yang disusun oleh Kementerian LHK juga sudah hampir selesai.

Penataan administrasi pertanahan di KSN Calon IKN akan dilakukan baik untuk Areal Penggunaan Lain (APL) maupun di dalam kawasan hutan. Lahan di kawasan APL akan dilakukan pembatasan pengalihan hak atas tanah yang diberlakukan untuk semua jenis hak atas tanah sejak Raperpres ini ditetapkan. Administrasi lahan di kawasan hutan sudah dilakukan pencadangan pelepasan lahan sebanyak 40 ribu hektar oleh Kementerian LHK. Lahan cadangan ini nantinya harus dilakukan pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan oleh Badan Otorita yang akan dibentuk melalui RUU IKN. Lahan yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan harus segera ditindaklanjuti oleh Badan Otorita dengan proses permohonan penetapan hak atas tanah melalui Kementerian ATR/BPN. Permasalahan lain di kawasan hutan adalah keberadaan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di tengah KSN Calon IKN yang menurut Pak Uke tidak perlu dilepaskan dari kawasan hutan serta tidak perlu dikeluarkan dari delineasi KSN Calon IKN. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Tahura Bukit Soeharto berfungsi sebagai kawasan lindung yang memang harus menjadi satu kesatuan dengan KSN Calon IKN. ***[Ryan Pribadi & Iman Sadesmesli, 2020]***.

Pleno Awal Tahun untuk RTRW Kabupaten Bengkalis, Siak dan Sinjai

Di awal tahun yang masih terasa segar ini, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas memberikan tiga surat rekomendasi kepada tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Sinjai. Proses pleno ini dilaksanakan setelah melewati beberapa kali proses asistensi dari mulai pemeriksaan sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana, album peta serta sinkronisasi dengan ranperda.

Surat rekomendasi kepada tiga kabupaten tersebut diserahkan langsung oleh Mulyanto Darmawan selaku Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Mulyanto menyampaikan bahwa penyelesaian pemetaan dengan target yang begitu banyak pada tahun 2019 menjadi pelajaran bahwa diperlukan koordinasi yang baik, kekompakan tim, serta strategi pencapaian supaya pekerjaan dapat selesai pada waktunya. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada tiga kabupaten yang telah menyelesaikan proses asistensi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Adapun dua dari tiga Rencana Tata Ruang (RTR) ini merupakan kabupaten yang diprioritaskan untuk percepatan penyelesaian perda.

Proses pleno dilaksanakan oleh tim teknis PTRA beserta tim dari pemda dan juga tenaga ahli. Proses uji petik yang dilakukan secara detil mulai dari tahapan sumber data sampai dengan album peta berlangsung lancar. Dua kabupaten mendapatkan rekomendasi dengan catatan dan satu kabupaten memperoleh rekomendasi tanpa catatan. Surat rekomendasi ini diharapkan dapat memperlancar proses perizinan pembangunan di daerah, tidak hanya untuk investasi namun juga untuk kenyamanan dan kelestarian kehidupan masyarakat selama dua puluh tahun kedepan. ***[Chintia Dewi, 2020]***

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.ptra@gmail.com
Twitter: @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/

EDISI JANUARI 2020

TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

Media Informasi Pemetaan Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas

Catatan Beranda

Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang pas untuk memulai kegiatan di awal tahun 2020 ini. Bulan Januari 2020, diwarnai dengan aktivitas review persiapan tahun berjalan dan refleksi program. Dalam refleksi program 2019 di stadion olahraga Laga Tangkas, Pakansari Cibinong, Kepala BIG, Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc memberikan arahan program strategis BIG kedepan, diantaranya terkait kebijakan satu peta dan pemetaan neraca sumberdaya alam. Kebijakan satu peta diarahkan pada skala besar dan penambahan tema sementara kegiatan neraca diarahkan untuk valuasi dan status sumberdaya alam Indonesia. Refleksi program perlu dilakukan BIG mengingat berbagai prestasi telah diraih BIG baik berasal dari dalam maupun luar negeri serta adanya kritik atas peran yang kurang optimal dari BIG. Isu lain refleksi yang tidak kalah penting adalah perampingan eselonisasi dan pembentukan badan baru bernama BRIN. Persoalan yang masih tersisa adalah para peneliti geopasial mesti pindah ke BRIN mengingat bidang geospasial tidak diakomodir dalam keahlian para peneliti di BRIN.

Bulan Januari juga ditandai dengan adanya rotasi pegawai dan pergantian beberapa struktural di BIG, tidak terkecuali di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA). Terjadi perpindahan atas beberapa staf PTRA, baik antar bidang ataupun pusat. Alhamdulillah, ada staf PTRA yang mendapat promosi di pusat lain. Sebaliknya, PTRA pun menerima tambahan tenaga dari pusat lain. Isu rotasi pegawai memang semakin terbuka serta menjadi menu obrolan keseharian pegawai di beberapa tempat. Pergantian dan rotasi pegawai adalah hal yang lumrah dalam sebuah organisasi, sebagai bagian dari pembinaan pegawai. Penempatan pegawai harus sesuai dengan kompetensi sehingga kinerja pegawai tersebut menjadi optimal.

Apa yang terjadi pada awal tahun 2020 ini seolah memberi gambaran betapa perubahan di masa depan akan sangat cepat dan sulit untuk diprediksi, namun tetap harus diantisipasi dan disikapi dengan benar. Seolah tidak terpengaruh dengan adanya perubahan, potret kegiatan PTRA selama bulan Januari diakui masih dalam taraf konsolidasi, termasuk persiapan Rakornas IG. Beberapa masalah sempat didiskusikan selama bulan Januari, khususnya terkait tata ruang skala detil (RDTR) yang memerlukan data dasar skala besar. Salah satu hal penting yang didiskusikan adalah reinterpretasi definisi IGT yang mengacu kepada IGD. Jika peta dasar yang diperlukan belum mampu disediakan oleh BIG, maka untuk pemetaan tematik mungkin dapat diarahkan pada referensi jaringan data CORS. Hal ini dikarenakan pemetaan tematik lebih menitikberatkan pada keakurasian substansi dibanding aspek geometrisnya. Untuk itu, BIG perlu menyiapkan standar pemetaan tematik yang mengacu kepada ketersediaan data dasar, khususnya pemetaan tematik skala besar. ***[Mulyanto Darmawan, 2020]***

REDAKSI:

| **Penanggung Jawab :** Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | **Tim Redaksi:** Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| **Editor:** Mulyanto Darmawan, Sri Eka Wati, Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| **Desain Tata Letak:** Gin Gin Gustiar |

POTRET KEGIATAN

Pembahasan Akhir Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) *Online Single Submission* (OSS)

Pada hari senin dan selasa tanggal 6-7 Januari 2020, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian ATR/BPN menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Pembahasan Akhir Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) *Online Single Submission* (OSS) di kantor BIG, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pemerintah daerah harus menyusun Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan industri dan kawasan usaha paling lama enam bulan sejak PP ditetapkan. Pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi urusan penataan ruang diharuskan memberikan bantuan teknis, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat 2. Terkait hal ini, Kementerian ATR/BPN didampingi oleh BIG sedang melakukan penyusunan 57 RDTR yang akan masuk kedalam OSS. BIG, dalam hal ini, bertugas membina dan mendampingi penyusunan Peta RDTR untuk keperluan *Online Single Submission* (OSS) atau sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik.

Pendampingan dan proses validasi yang dilakukan meliputi penyusunan sumber data peta dasar, peta tematik, peta rencana, album peta, kesesuaian peta rencana dengan Ranperda, serta integrasi pada semua unsur tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan banyak kendala karena keterbatasan waktu, banyaknya jumlah RDTR yang harus tersusun, terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai aspek perpetaan, serta ketersediaan data (sumber data dan peta dasar) yang belum mencakup seluruh wilayah perencanaan.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, Dr. Antonius Bambang Wijanarto, menyampaikan bahwa BIG ikut memikirkan strategi dan terobosan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, tanpa menurunkan standar dan kualitas peta RDTR yang harus dirampungkan. Salah satu hal yang dilakukan BIG adalah melaksanakan asistensi intensif atau klinik, baik di BIG atau Kementerian ATR/BPN, dengan melibatkan cukup banyak personel. Sebagai hasilnya, akan diserahkan surat rekomendasi RDTR untuk sejumlah daerah melalui sidang pleno. Sidang pleno sendiri bertujuan untuk verifikasi proses asistensi dan memberikan jaminan kualitas terhadap peta rencana tata ruang yang sudah dilakukan pembahasan. Dari hasil pembahasan terhadap 57 kawasan RDTR OSS, 49 kawasan sudah mendapatkan rekomendasi, 3 belum mendapatkan rekomendasi, dan 5 belum mengikuti rekomendasi.

Peta RDTR yang sesuai kaidah dan standar perpetaan sangat berguna pada saat implementasi OSS karena seluruh perizinan ke depannya dilaksanakan secara *online*. Bagi investor, hal ini berguna untuk menentukan lokasi dan jenis investasinya. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pemerintah daerah memberikan izin investasi, karena peta RDTR memberikan kepastian hukum terhadap proses perizinannya. ***[Izzuddin Abdul Aziz, 2020]***

Tabel Status Jumlah Rekomendasi Peta RTR Januari 2020

Nama Provinsi	RDTR	RTRW Kab/Kota	RTRW Prov	KSP	Total
Aceh	7	16	0	0	23
Bali	16	5	0	0	21
Banten	7	6	0	0	13
Bengkulu	1	1	0	0	2
D.I.Yogyakarta	6	2	0	0	8
D.K.I Jakarta	0	0	0	0	0
Gorontalo	0	2	0	0	2
Jambi	4	8	0	0	12
Jawa Barat	15	10	0	0	25
Jawa Tengah	56	27	0	0	83
Jawa Timur	87	19	0	0	106
Kalimantan Barat	5	0	0	0	5
Kalimantan Selatan	8	8	0	0	16
Kalimantan Tengah	3	8	0	0	11
Kalimantan Timur	17	1	0	0	18
Kalimantan Utara	1	0	0	0	1
Kep. Bangka Belitung	7	3	0	0	10
Kep. Riau	4	4	0	0	8

Nama Provinsi	RDTR	RTRW Kab/Kota	RTRW Prov	KSP	Total
Lampung	0	7	0	0	7
Maluku	3	1	0	0	4
Maluku Utara	2	6	0	0	8
Nusa Tenggara Barat	10	5	0	0	15
Nusa Tenggara Timur	5	6	0	0	11
Papua	9	1	0	0	10
Papua Barat	0	0	0	0	0
Riau	0	4	0	0	4
Sulawesi Barat	4	5	0	0	9
Sulawesi Selatan	24	11	0	0	35
Sulawesi Tengah	1	2	0	0	3
Sulawesi Tenggara	3	9	0	0	12
Sulawesi Utara	0	4	0	0	4
Sumatera Barat	6	11	0	0	17
Sumatera Selatan	1	6	0	0	7
Sumatera Utara	3	3	0	0	6
Jumlah	315	201	0	0	516

Ragam Kegiatan Pusat Pemetaan Tata Ruang & Atlas 2019

MENGENAL INDONESIA MELALUI PETA DAN ATLAS
Kunjungan Belajar Siswa-Siswi SMPIT Arrafah ke BIG

Mengawali tahun yang baru, pada tanggal 20 Januari 2020, BIG mendapat kunjungan lebih dari 100 orang siswa-siswi SMPIT Arrafah. Untuk menyambut, siswa-siswi kelas VIII dan beberapa guru pendamping dari sekolah tersebut disampaikan beberapa materi terkait produk dan layanan BIG. Dalam acara tersebut, Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial menyampaikan materi bertajuk "Mengenal Indonesia melalui Peta dan Atlas". Materi ini disampaikan dengan maksud mengajak peserta didik dari sejak dini untuk mengenali kekayaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menggunakan sudut pandang geospasial.

Pengetahuan terkait kewilayahan yang meliputi luas wilayah darat dan laut beserta batas-batasnya, panjang garis pantai, dan jumlah pulau menjadi salah satu bagian yang membuat peserta terkagum-kagum akan kekayaan wilayah yang dimiliki NKRI. Terlebih saat membandingkannya dengan masing-masing benua yang ada di dunia, semakin menunjukkan bahwa melalui peta, Indonesia adalah negara yang besar. Selain itu, peserta juga dikenalkan dengan berbagai macam produk atlas tematik yang ada di BIG. Salah satunya adalah Atlas Taktual untuk disabilitas netra, yang membukakan mata peserta tentang antusiasme dalam mempelajari dan semakin mengenali wilayah NKRI melalui Informasi Geospasial. ***[Satrio Jati Kinantyo Widhi, 2020]***

Rapat Kerja Kedeputian Bidang Infomasi Geospasial Dasar dan Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik

Rapat Kerja Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Dasar dan Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik diselenggarakan di Bandung, 10 Januari 2020. Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II, dan III di lingkungan Kedeputian IGD dan IGT serta staf perencana dan evaluasi pelaporan dari masing-masing unit eleson II. Rapat kerja ini merupakan momen untuk saling mensinergikan kegiatan agar produk dan layanan yang diselenggarakan oleh BIG dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat luas.

Kegiatan diawali dengan paparan dari Agung Usadi yang telah berpengalaman sebagai direksi PT. Surveyor Indonesia dan PT. INUKI. Paparan dari Agung Usadi berisi kiat-kiat bertransformasi untuk sebuah lembaga pemerintah. Agung Usadi juga mengkritisi kebiasaan-kebiasaan yang ada di BIG mengingat beliau belum lama ini mempelajari proses bisnis pada salah satu pusat teknis di BIG. Selanjutnya, acara diisi dengan paparan masing-masing deputi terkait arah kegiatan dan program kerja kedepan.

Pada sesi akhir yang dimoderatori oleh Ade Komara, peserta diminta untuk duduk secara acak agar suasana antar dua kedeputian semakin cair. Semua peserta diminta menyampaikan hambatan-hambatan maupun hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja dua kedeputian melalui aplikasi *pooling*. Dalam sesi akhir ini juga dilakukan pemaparan kesepakatan antara dua kedeputian yaitu: 1.) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara formal maupun informal; 2.) Meningkatkan frekuensi komunikasi antara pimpinan dan pegawai dengan memastikan arahan sampai ke level yang paling bawah dan memastikan kesesuaian visi, misi, sasaran, program, IKU organisasi dan IKU pegawai; 3.) Meningkatkan kompetensi pegawai yang terdiri dari kompetensi teknis geospasial dan kompetensi non teknis: *Public Speaking*, Bahasa Inggris, dll.; 4.) Dipertimbangkan untuk mengadakan sayembara pembuatan model produk (analisis, aplikasi, dsb.) geospasial baru (aplikasi geospasial untuk pembangunan) untuk kalangan pegawai BIG. Pemenang sayembara akan diberikan hadiah *training*/presentasi ke luar negeri. ***[Noor Adhi Sakti, 2020]***

RESENSI Buku

Anomali Cuaca dan Iklim Indonesia

"Negeri Tanggap Bencana", adalah judul sebuah artikel yang disajikan oleh penulis dan menjadi pembuka buku ini untuk menyambut para pembacanya. Penulis ingin mengingatkan bahwa Indonesia sudah selayaknya menjadi negeri yang tanggap bencana, negeri yang sadar dengan berbagai risiko peristiwa alam yang terjadi, dimana kesadaran tersebut dapat dimulai dari pemahaman terhadap 'keunikan' kondisi geografis Indonesia. Indonesia yang merupakan negara yang dilalui oleh Sirkum Mediterania di Sumatera (Bukit Barisan), Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, juga dilalui oleh Sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi dan Papua, dimana kedua sirkum tersebut berupa barisan pegunungan hasil pertemuan lempeng benua dan samudera di bawahnya yang memunculkan berbagai gunungapi diatasnya, sehingga memiliki potensi bencana yang tinggi terkait keberadaan gunung berapi tersebut. Selain itu tidak kalah dahsyatnya adalah atmosfer di Indonesia yang memiliki perilaku yang berbeda dibanding atmosfer wilayah lainnya dimana atmosfer di Indonesia dipengaruhi oleh tiga pengaruh sirkulasi.

Selanjutnya dalam buku ini, penulis menyampaikan berbagai macam anomali cuaca dan iklim yang terjadi di Indonesia yang tentunya beberapa diantaranya berpotensi menimbulkan terjadinya bencana. "Tsunami terjadi di musim hujan?", "Banjir di kota Bandung. kok bisa ya?", "Mengapa sering hujan saat ini di tanah air?", "Mengapa Palembang, Sumatera Selatan gerah dan panas?", "Bagaimana hujan es bisa terjadi?", "Banjir dan longsor. itu sudah biasa?" adalah beberapa contoh peristiwa yang diulas oleh penulis yang terkait dengan anomali. Menurut penulis, meskipun kejadian anomalinya terjadi di Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan pengaruh dari berbagai fenomena alam yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia. Sebagai negara kontinen maritim, Indonesia juga memiliki peran penting dalam membentuk cuaca, musim, dan iklim (cusiklim) tropis dan global.

Peristiwa cusiklim lainnya yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari manusia, yang terkait dengan cusiklim seperti El Nino, La Nina, dan Dipole Mode meskipun beberapa tidak terjadi di Indonesia juga dimunculkan dalam buku ini, sehingga dapat memberikan khazsanah pengetahuan yang lebih luas bagi para pembaca. Terlebih gaya bahasa yang ringan dan populer yang digunakan dalam buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah. ***[Rochmat Budi Santoso, 2020]***

Judul Buku	:	Anomali Cuaca dan Iklim Indonesia
Penulis	:	Joko Wiratmo
Penerbit	:	ITB
Tahun Terbit	:	2017